



DUGAAN KORUPSI TERMINAL MANUVER

- Tak hanya pungli, diduga ada indikasi korupsi dalam pengelolaan Terminal Manuver.
- Tim kejaksaan sudah sejak sebulan lalu melakukan puldata.
- Indikasi korupsi ini muncul karena banyaknya karcis yang keluar, tapi retribusi minim.
- Kerugian negara diduga mencapai ratusan juta.
- Kasus ini belum diberitahukan kejaksaan dengan alasan menunggu pemeriksaan BPKP.

Retribusi Bocor di Terminal Manuver

Nilainya Ratusan Juta, Kejaksaan Langsung Bergerak

NEGARA - Kawasan Kelurahan Gilimanuk selain rawan terjadi pungutan liar oknum petugas, ternyata juga tercium indikasi adanya korupsi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana mencium dugaan korupsi itu dan sedang melakukan penyelidikan dugaan indikasi korupsi di Terminal Manuver Gilimanuk.

Menurut informasi, dugaan tindak pidana korupsi di Terminal Manuver Gilimanuk ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Kerugian Negara tersebut terungkap dari hasil penghitungan jumlah karcis masuk terminal yang dikeluarkan di bandingkan dengan uang retribusi yang masuk ke kas daerah. Karcis banyak yang keluar, tetapi pendapat dari retribusi sedikit.

Dugaan korupsi pungutan retribusi yang dilakukan sistematis oleh pengelola Terminal Manuver Gilimanuk. Kejari Jembrana sudah memeriksa banyak saksi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana (Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana). "Puluhan orang sudah diperiksa untuk kasus ini," kata sumber tepercaya koran ini.

Namun hingga saat ini, Kejaksaan

saan Jembrana yang sudah sebulan lebih melakukan penyelidikan namun belum diberitahukan ke media, karena masih dalam proses pengumpulan data dan keterangan. Terminal Manuver Gilimanuk ini, sebelumnya dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana, sejak dua tahun terakhir diserahkan pada bernama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

Kasi Intel Kejari Jembrana Ario Dewanto saat dikonfirmasi mengakui telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan data dan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi terminal yang berada di samping Pelabuhan Gilimanuk itu. Memang ada indikasi kerugian negara, tetapi untuk menghitung dan menentukan ada tidaknya kerugian negara tersebut domain dari BPK atau PBKP. "Kami masih Puldata dan Pulbaket," terangnya. Hasil penyelidikan lebih lengkap akan disampaikan Kejari Jembrana setelah proses penyelidikan selesai.

Di sisi lain, Terminal Manuver Gilimanuk sudah lama dikeluhkan terutama oleh pengguna jasa Pelabuhan Gilimanuk yang akan ke Pelabuhan Ketapang. Pungutan retribusi karcis yang dilakukan petugas dinilai aneh karena pengguna jalan hanya lewat terminal dan tidak menggunakan fasilitas parkir terminal. (bas/gup)

Edisi : Jumat 7 April 2017

Hal : 5



KORUPSI PARKIR

Kejari Janji Jawab Laporan Parkir

GIANYAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar berjanji akan menjawab laporan yang dilayangkan DPC Garda Tipikor (GTI) Gianyar tentang dugaan korupsi pengelolaan parkir pasar senggol Gianyar. Kasi Intel Kejari Gianyar, Gusti Agung Puger, akan membuat jawaban perihal laporan yang dilayangkan itu usai hari raya Galungan.

"Kami akan segera menjawab laporan yang dilayangkan oleh pihak GTI, tapi setelah Galungan kami akan ketik dan berikan jawaban," ujar Puger kemarin (4/4). Dia mengakui, laporan yang dilayangkan GTI pada 8 Agustus 2016 lalu belum ada tindak lanjut. Bahkan pertanyaan atas laporan dari GTI pada 18 Maret 2017 juga belum sempat dijawab.

"Ya, memang mereka sudah menanyakan baik lisan maupun tertulis. Secepatnya kami berikan jawaban," jelasnya. Ditanya bagaimana hasil laporan tersebut, Agung Puger tidak mau membeberkan hasilnya kepada koran ini. "Nanti biar kami jawab dulu (laporan GTI)," ungkapnya.

Sedangkan, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar Made Endra Arianto, menyatakan masalah laporan dari pihak GTI itu masih menjadi kewenangan Kasi Intel. "Kalau nanti ditemukan indikasi, kami (Pidsus) yang tangani. Sekarang masih dilihat dulu," jelasnya. Mengenai jawaban itu, akan dibuatkan secara tertulis disertai alasannya oleh bidang Intel.

Sebelumnya, menindaklanjuti laporan GTI, pada Oktober 2016 lalu Kejari Gianyar tidak diam saja. Pihak Kejari telah memanggil beberapa pihak yakni pihak prajuru desa pakraman Gianyar. Prajuru desa di dampingi kuasa hukum mereka juga menyerahkan berkas data parkir kepada Kejari. (dra/gup)

Edisi : Rabu, 5 April 2017

Hal : 22